

Mempertahankan Keragaman Budaya

S elama ini, budaya sering dianggap sebagai suatu yang *given*, terjadi secara alami, dan apa adanya. Tetapi, belakangan, baru disadari bahwa budaya adalah ciptaan manusia secara kolektif yang punya tujuan tertentu. Sebab, budaya tidak hanya digunakan sebagai sarana *pursuit of total perfection*, penyempurna kehidupan manusia, tetapi sekaligus digunakan sebagai sarana menciptakan *glory* (kemegahan). Bila telah sampai taraf ini maka dominasi, hegemoni dan imperialisme kebudayaan tidak bisa dielakkan. Budaya dijadikan sarana penaklukan dan penguasaan atas budaya dan bangsa lain, baik atas nama kekuasaan, agama atau peradaban. Tetapi kesemuanya cenderung mengarah pada penguasaan; penguasaan cara berpikir dan bercitarasa dalam kebudayaan, yang kesemuanya akan bermuara pada penguasaan politik dan aset-aset ekonomi. Maka, imperialisme kebudayaan juga akan berkembang menjadi kolonialisme politik.¹

Sebagai ilustrasi dari pemikiran di atas, belum lama ini terjadi peristiwa keagamaan penting yang terjadi di Indonesia. *Pertama*, acara dzikir nasional di Masjid Istiqlal Jakarta. *Kedua*, istighotsah



Abdul Mun'im DZ

di Lapangan Makodam Surabaya. Walaupun kedua acara tersebut memiliki kesamaan, yakni berdoa, tetapi sarana, tata cara dan tujuannya sangat berbeda. Perbedaan tersebut mengekspresikan perbedaan di tingkat penghayatan dan penerapan nilai-nilai agama yang mereka anut. Kedua peristiwa tersebut juga merupakan perwujudan dari ekspresi kebudayaan yang mereka aspirasikan.

Pada acara dzikir nasional di Masjid Istiqlal semua jamaah sejak para imam dan peserta menggunakan pakaian jubah dan surban putih, sementara pada acara Istighotsah kelihatan sangat warna warni, ada yang pakai sarung dengan peci, atau ada beberapa yang bersurban, terutama kalangan elite, ada pula yang hanya memakai helm dan celana panjang. Begitu pula kalangan perempuan memakai baju kebaya, busana muslim yang tidak seragam, tidak ada ketentuan pakaian dalam acara ini.

Fenomena fisik tersebut bila dibaca secara semiotik (ilmu tentang tanda) menggambarkan realitas yang lebih luas dan lebih dalam, yang mencerminkan fenomena batiniah mereka. Fenomena batiniah ini meliputi cara berpikir dan

¹Ngugi, *The Struggle for Cultural Freedoms* (London: James Cury Ltd., 1993), hlm., 49.

bersikap yang akan digunakan sebagai referensi untuk bertindak. Bagi kelompok pertama, penggunaan jubah (pakaian Arab) menunjukkan indikasi adanya orientasi Arabisme yang tinggi dengan implikasi penolakan terhadap pakaian lokal atau varian pakaian lainnya. Sementara keseragaman warna mencerminkan keseragaman dalam berpikir di kalangan mereka, yakni adanya keharusan berpikir secara islami, sebagai titik tolak berislam secara *kâffah*. Hal itu juga dilanjutkan dengan keketatan dalam penggunaan bahasa, mereka menolak penggunaan terminologi lokal untuk beberapa istilah seperti *shaum*, *shalat*, atau *dien*, sebagai pengganti istilah puasa, sembahyang atau agama, karena istilah ini tidak dianggap islami (Arab). Terlepas bahwa orang Arab non-Muslim, baik pagan, Yahudi atau Nasrani menggunakan istilah tersebut dalam perbincangan sehari-hari.

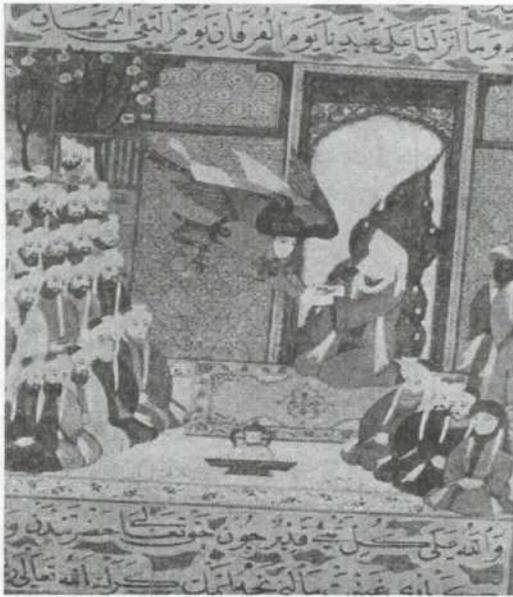
Pemikiran tersebut juga terefleksi dalam sikap mereka, mereka ini mulai berusaha mengukuhkan diri sebagai masyarakat Islam, yang lebih tegas lagi sebagai masyarakat tauhid (homogen) yang bersifat puritan, karena itu punya kecenderungan eksklusif. Dari situ kemudian muncul Islamic Centre, Bank Syariah sampai pada Moslem Estate, atau perkampungan Islami dan sebagainya. Semuanya itu sebagai realisasi dari apa yang disebut masyarakat tauhid, tidak

hanya dalam arti masyarakat yang tidak menyekutukan Tuhan, tetapi juga masyarakat yang tidak berbaur dengan komunitas lain di luar komunitas Islam. Tauhid sosial akan mengarah pada homogenitas sosial, yang dengan sendirinya akan menolak pluralitas atau multikulturalisme,² karena setiap keragaman bisa mengurangi arti ketunggalan atau ke-tauhidan.

Pada taraf berikutnya sikap tersebut terefleksikan dalam tindakan politik, maka dari gagasan masyarakat Islam akan berkembang pada aspirasi politik negara Islam, yang hal itu telah lama dimulai dengan melakukan islamisasi birokrasi. Karena itu, tuntutan penerapan syariat Islam, yang selama ini disembunyikan, sekarang semakin berkembang sejalan dengan keterbukaan politik dewasa ini. Yang ini juga disertai dengan islamisasi gaya hidup.

Berbeda dengan Istighotsah yang diselenggarakan NU, penampilan warna warni dari segi pakaian juga mencerminkan pluralisme dalam sikap dan pemikiran. Mereka berdoa, bukan untuk keselamatan NU atau Islam belaka, tetapi demi keselamatan bangsa. Cara mereka berpakaian mencerminkan keragaman budaya Nusantara, semua boleh tampil secara serentak. Walaupun ekspresi budaya yang ditampilkan berbeda, tetapi dianggap telah memenuhi aspirasi Islam. Pluralisme tidak hanya ditujukan pada

²Prinsip semacam itu membenarkan teori Peter Berger bahwa sekulerisme bukan diakibatkan modernisme, melainkan oleh pluralisme sosial sendiri. Lihat Peter Berger, *Faar Glory*, Boston, 1994.



budaya Islam tetapi juga toleransi dengan budaya dan adat setempat serta komunitas non-Islam lainnya, sebagai konsekuensi dari paham kebangsaan maka solidaritas kebangsaan menjadi sangat tinggi, sehingga setiap warga bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama tidak peduli etnis, agama dan ideologi politiknya.

Keseimbangan antara Islamisasi dan Pribumisasi

Sejak kehadiran Islam, para ulama Nusantara telah mencoba mengadopsi kebudayaan lokal secara selektif, sistem sosial, kesenian dan pemerintahan yang sudah pas tidak diubah, termasuk adat istiadat, banyak yang dikembangkan dalam perspektif Islam. Hal itu yang memungkinkan budaya Nusantara tetap beragam, walaupun Islam telah menyatukan wilayah ini secara agama. Dari segi cara berpakaian mereka masih memakai

pakaian adat, dan oleh ulama setempat dianggap telah cukup memenuhi syarat untuk menutup aurat. Kalangan ulama perempuan dan isteri para kiai memakai pakaian adat, sebagaimana masyarakat setempat yang lain.

Setrategi itu dijalankan di samping memperakrab Islam dengan lingkungan setempat, juga memberikan peluang bagi industri pakaian adat untuk terus berkembang, sehingga secara ekonomi mereka tidak terganggu dengan kehadiran Islam, kalau bisa justru dikembangkan. Pada periode ini Islam sangat kental dengan warna lokal, sehingga setiap Islam daerah bisa menampilkan keislamannya secara khas berdasarkan adat mereka. Di situ, keislaman benar-benar menyatu dengan kenusantaraan atau keindonesiaan, tidak hanya dari segi adat istiadat, tetapi juga pemikiran dan aspirasi politiknya, yang berorientasi kebangsaan, bukan keislaman.

Kalangan Ulama Nusantara memang telah berhasil mengintegrasikan antara keislaman dengan keindonesiaan atau kenusantaraan, sehingga apa yang ada di daerah ini telah dianggap sesuai dengan nilai Islam, karena Islam menyangkut nilai-nilai dan norma, bukan selera atau ideologi apalagi adat. Karena itu, ketika nilai Islam dianggap sesuai dengan adat setempat, tidak perlu lagi diubah sesuai dengan selera, adat, atau ideologi Arab, sebab bila itu dilakukan akan menimbulkan kegoncangan budaya, sementara mengisi nilai Islam ke dalam setruktur budaya yang ada jauh lebih efektif

ketimbang mengganti kebudayaan itu sendiri. Terbentuknya Islam Nusantara sendiri sebenarnya merupakan sejarah panjang yang penuh kritik dan otokritik, sehingga mencapai keseimbangan seperti sekarang ini.

Langkah tersebut sebenarnya tidak berjalan mulus atau atas kehendak satu pihak saja, melainkan merupakan konklusi dari sebuah dialog bahkan debat yang sengit antara pihak pujangga Islam dengan pihak pujangga Hindu-Kejawen.³ Islamisasi awal yang dianggap terlalu mencolok, karena tidak mempertimbangkan proses asimilasi dan akulturasi dengan adat dan kepercayaan setempat seperti yang dilakukan Sunan Bonang itulah yang mendapat kritik keras dari kalangan kejawen yang merasa terdesak,⁴ sehingga para wali yang lain perlu merevisi cara-cara tersebut. Demikian pula proses Islamisasi yang dilakukan zaman Kartosuro yang dilakukan oleh Kyai Hasan Besari juga mendapatkan resistensi dari kalangan Hindu-Jawa,⁵ karena itu proses pengenalan Islam zaman Ronggowarsito sudah sangat berbeda dengan cara yang dilakukan gurunya itu, ia lebih mene-

kankan asimilasi⁶ dan pribumisasi ajaran Islam bahkan, berani mengkaitkan dengan ide-ide Jayabaya mengenai perkembangan sejarah dan juga dengan pujangga pra-Majapahit lainnya.

Pudarnya Warna Lokal

Gerakan pribumisasi Islam yang dirintis para wali dan dilanjutkan para ulama zaman Demak, Mataram hingga Kartosuro itu berkembang sangat pesat karena berhasil mengintegrasikan diri dengan peradaban yang ada, sehingga tidak lagi terjadi ketegangan antara agama *samâwiy* dan *ardliy*. Semua sistem pengetahuan dan kebudayaan diapresiasi secara setara, yang kemudian diolah menjadi kebudayaan baru yang lebih relevan. Tetapi proses itu lambat laun mengalami kemandekan, ketika hubungan antara Islam Jawa dengan Islam pusat di Mekah semakin intensif, terutama dengan perkembangan transportasi modern sejak masa awal Belanda. Maka puritanisasi Islam, —yang menolak seluruh warna lokal dari Islam, akhirnya proses Jawanisasi, Melayuisasi— berhenti diganti dengan proses Arabisasi. Islam menjadi semakin

³Lihat GWJ Drewes, "The Struggle between Islam and Javanism", dalam *Bijdragen*, Dell 122, KITLV, 1966.

⁴Kritik tersebut dapat dilihat dalam buku yang sangat kontroversial hingga saat ini yaitu *Serat Dama Gandul* (Solo: Penerbit Soebarno, tth.)

⁵Reaksi kalangan Hindu-Kejawen terhadap gerakan Kyai Hasan Besari ini ditulis secara lengkap dalam *Serat Gatolotjo* (Solo: Penerbit Mulija, tth.)

⁶Itulah sebabnya ketika membangun kebudayaan Indonesia Ki Hadjar Dewantara merekomendasi untuk bersikap asimilatif terhadap kebudayaan luar, agar tidak terjadi duplikasi, tetapi muncul sintesis budaya baru yang orisinal. Baca Ki Hadjar Dewantara, *Kebudayaan* (Yogyakarta: Penerbit Taman Siswa, 1967), hlm., 94 dst.

berkembang di bawah bendera purifikasi atau pemurnian ajaran Islam terutama yang dipelopori oleh gerakan Wahhabi⁷ yang sangat gencar melawan semua bentuk apresiasi terhadap adat dan tradisi lokal.

Hanya kalangan komunitas Islam tradisional yang berbasis di pesantren-pesantren salaf saja yang bisa membendung arus purifikasi tersebut. Karena, pesantren merupakan cagar budaya yang mampu mengembangkan tradisi sendiri, baik tradisi pemikiran, keilmuan, berbahasa dan tata cara berpakaian. Dengan adanya cagar budaya itu, maka pluralisme pemahaman Islam bisa dipertahankan, dan relasi Islam dengan komunitas non-Islam, baik komunitas adat, maupun agama lain, juga terus bisa dijamin di bawah prinsip toleransi yang dikembangkan kalangan Islam tradisional.

Keragaman Islam Nusantara semakin pudar ketika hadirnya abad ke 15 dijadikan momentum kebangkitan Islam. Hal itu terjadi ketika persentuhan Islam Indonesia dengan Arab semakin intensif. Gerakan itu menemukan momentumnya ketika terjadi revolusi Iran 1978, yang berusaha mengimpor revolusi mereka ke negara berpenduduk Islam. Pesona revolusi Iran saat itu memang melanda ke mana-mana, bahkan dijadikan tipe ideal gerakan Islam. Maka mulai saat itu, aspirasi negara Islam muncul kembali dan

fenomena jilbab bermunculan di mana-mana. Perempuan di berbagai perguruan tinggi Islam yang selama ini tampil berpakaian warna warni, baik kebaya maupun kerudungnya, sesuai dengan asal daerah mereka, tiba-tiba mulai berganti jilbab yang monoton, rapat dan tunggal, yang hanya memenuhi dimensi penutup aurat (secara Islam Arab) dan hampir tanpa mengapresiasi dimensi estetika dari pakaian sebagaimana diekspresikan oleh pakaian Islam adat.

Tata cara berpakaian yang tunggal dalam bentuk jilbab itu akhirnya juga menembus lingkungan pesantren yang selama ini merupakan cagar tradisi. Kecuali kalangan wanita yang lanjut usia, sementara kalangan muda mengganti kebaya dan kerudung mereka dengan pakaian baru gaya Arab itu, bahkan kalangan remaja tidak lagi mengenal kebaya atau pakaian adat lainnya, mereka mulai menggunakan jilbab. Pakaian adat hanya sesekali muncul pada acara pernikahan, itu kalau dianggap perlu. Demikian juga kesenian adat, norma-norma adat hampir telah didominasi oleh norma Islam dalam ekspresi Arab, sementara yang selain Arab tidak lagi dianggap Islam.

Langkah Tentatif

Sebenarnya, tidak ada yang salah dalam mengadaptasi kebudayaan Arab dalam mengekspresikan keberagaman

⁷Gerakan pemurnian yang dilakukan kalangan Wahhabi ini dengan sendirinya menggempur adat dan tradisi lokal karena semuanya mereka anggap sesat. Lihat Hamka, *Dari Perbendaharaan Lama* (Medan: Firma Maju, 1963), hlm., 180.

atau keislaman seseorang. Tetapi yang menjadi masalah adalah menggunakan ekspresi kearaban sebagai ekspresi tunggal dan dianggap paling absah dalam beragama dan berkebudayaan, sehingga ekspresi kearaban menjadi dominan, bahkan menghegemoni budaya dan tradisi lain. Sehingga mengakibatkan tradisi tersebut tidak hanya pudar, tetapi juga mati. Lebih celaka lagi tradisi setempat kemudian dianggap sesat, musyrik atau bid'ah. Sudah pasti sikap itu merupakan langkah pembasmian terhadap tradisi lokal, yang selama ini telah dikembangkan para ulama Islam di berbagai belahan dunia non-Arab, bahkan Arab pinggir. Maka yang diperlukan adalah bagaimana berbagai ekspresi kebudayaan bisa hidup bersama dan saling memperkaya, bukan saling menafikan. Hal itu mengandaikan adanya perubahan total dalam memahami agama dan metode berdakwah.



Untuk meleburkan aspirasi Islam ke dalam aspirasi keindonesiaan, mesti menempatkan dulu Islam sebagai sistem dari kultur Indonesia. Dengan demikian kemunduran atau kemajuan kebudayaan Islam akan tercemin dalam maju atau mundurnya moralitas dan intelektualitas bangsa ini. Ini juga mengandaikan bahwa warisan budaya Indonesia ini juga merupakan warisan kebudayaan Islam yang sah. Pengalaman sejarah Indonesia baik pra-Islam hingga zaman Islam perlu diintegrasikan ke dalam pengalaman sejarah Islam sendiri. Hanya dengan cara itu pribumisasi ajaran Islam bisa terus-menerus dilakukan, karena telah tercapai konvergensi antara pemahaman keagamaan dengan struktur kebudayaan yang ada.

Karena ketegangan *samâwiy* versus *ardliiy* merupakan akibat dari eksternalisasi Islam yang berlebihan, sehingga mengabaikan proses internalisasi terhadap ajarannya sendiri. Akhirnya yang diperoleh hanya pemahaman harfiah, tanpa mampu menyentuh nilai yang lebih hakiki dari ajaran tersebut. Akibatnya tidak mampu mengasimilasikan ajaran Islam dengan produk-produk kultur setempat. Dalam proses asimilasi itulah terjadi gerak seimbang antara proses *langitanisasi* dan proses *pribumisasi* atau antara Islamisasi Jawa dan Jawanisasi Islam, keduanya saling menyatu dan saling memperkaya. Ini karena sejak awal Islam tidak datang untuk menaklukkan Jawa, tetapi untuk mengembangkan masyarakat Jawa yang sudah beradab dengan mengakui hak-hak kultural masyarakat setempat yang selama ini mereka jalankan dan kembangkan.

Dengan menempatkan agama sebagai sistem kultural —sementara sistem tersebut ciptaan manusia secara kolektif, yang bahannya boleh jadi berasal dari doktrin agama yang diramu dengan kultur setempat, baik kejawaan, kemelayuan, Pasundan, bahkan dari Hinduisme dan Budhisme— hal itu menjadikan agama sebagai produk komunitas. Ini sebenarnya yang terjadi di Indonesia, hanya saja belum mendapatkan pengakuan yang semestinya. Kebudayaan ini terus berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika zaman, melalui sarana tradisi. Karena tradisi merupakan dimensi kebudayaan yang dibakukan kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi. Pandangan semacam ini akan membuat orang lebih ramah terhadap berbagai bentuk perkembangan kebudayaan.

Keramahan dengan dimensi kebulmian —yakni kebudayaan dengan berbagai aspeknya, baik sebagai sistem makna, sistem nilai dan sistem sosial, yang kemudian diwujudkan dalam cara berpikir, bersikap dan berperilaku— lama-kelamaan akan mampu menjadi rujukan dalam berpikir dan bertindak. Jika selama ini perdebatan keilmuan Islam hanya berputar pada dilema dalil *'aqliy* (akal) dan *naqliy* (wahyu) sebagai sumber keilmuan, maka perdebatan seharusnya sudah

melewati lingkaran tersebut menuju sumber yang bersifat *waqi'iy* (realitas empirik). Sebab bagaimanapun kayanya ruang lingkup akal dan wahyu, realitas empirik jauh lebih kaya karena terus berkembang sesuai dengan perkembangan sosial.

Sama halnya untuk menjadikan Islam sebagai bagian dari bangsa ini atau kebudayaan Indonesia, maka kajian historis terhadap sejarah Islam Indonesia menjadi sangat penting. Karena Islam Indonesia mengalami pembentukan sepanjang sejarah bangsa ini, bukan sesuatu yang langsung jadi yang dibawa dari Gujarat atau Mekah, tetapi melalui proses, adaptasi, asimilasi yang terus-menerus, sehingga memperoleh bentuknya seperti sekarang ini. Mengetahui proses sejarah ini akan menimbulkan kesadaran bahwa perkembangan Islam senantiasa melalui proses antropologis dan sosiologis biasa, bukan melalui kemukjizatan yang tidak ada prosesnya. Hanya dengan kesadaran historis dan budaya semacam itu, kemudian ditopang dengan keilmuan empirik dan rasional itu mereka bisa melihat problematikanya sendiri dan mampu mencari solusinya sendiri secara empirik, bukan dengan cara memanipulasi agama untuk menyelesaikan persoalan dunia yang dihadapi. ❖